



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/SKLN-X/2012**

PERIHAL

**SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TERHADAP
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN PARA PIHAK
(III)**

J A K A R T A

JUMAT, 27 JANUARI 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/SKLN-X/2012

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Direktorat Jenderal Optonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri terhadap Komisi Independen Pemilihan Aceh

Pemohon:

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri R.I.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Para Pihak (III)

Jumat, 27 Januari 2012, Pukul 08.31 – 08.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) Harjono | (Anggota) |
| 4) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 5) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 8) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 9) Anwar Usman | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1) Mualimin Abdi
- 2) Djohermansyah Johan
- 3) Susilo
- 4) Dody Riyatmadji

B. Termohon:

- 1) Ilham Saputra (Wakil Ketua KIP)

C. Kuasa Hukum Termohon:

- 1) Imran Mahfudi

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- 1) Sayuti Abubakar

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.31 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar lebih lanjut keterangan para pihak dalam Sengketa Kewenangan antara Menteri Dalam Negeri, dan KIP, dan/atau KPU Nomor Perkara 1/SKLN-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon silakan perkenalkan diri dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia, hadir Kuasa Hukum dari Pemohon Menteri Dalam Negeri, saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebelah kanan saya Prof. Dr. Djohermansyah Johan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, sebelahnya ada Pak Susilo Direktur Otonomi Khusus Kementerian Dalam Negeri, kemudian di sebelahnya lagi ada Dody Riyatmadji Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan di belakang ada kawan-kawan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yang Mulia.

Terima kasih.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KIP/KPU?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: IMRAN MAHFUDI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari KIP Aceh hadir Bapak Ilham Saputra, Wakil Ketua KIP, saya sendiri Kuasa Hukum KIP Imran Mahfudi. Terima kasih.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, Terkait ya?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR

Ya, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Saya Sayuti Abubakar Kuasa Hukum dari drh. Irwandi Yusuf.

Terima kasih, Majelis.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada ... atau tawarkan atau menanyakan kepada Pemohon, apakah ada hal-hal baru yang ingin disampaikan dalam permohonan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kira cukup, Yang Mulia. Sebagaimana sidang yang lalu, perbaikan juga sudah kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik. Kepada KIP di... Termohon dipersilakan untuk menyampaikan apa yang telah Saudara lakukan setelah ada putusan sela tanggal 16 Januari yang lalu.

Kemudian, langkah-langkah apa yang Saudara siapkan untuk meneruskan ... apa ... perintah Mahkamah Konstitusi itu dan apa yang ingin Saudara mohonkan untuk langkah-langkah berikutnya?

10. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kami bermaksud menyampaikan apa saja yang sudah kami lakukan pasca Putusan Sela dari Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Januari kemarin.

Pertama adalah kami ketika itu langsung membuat pengumuman, Yang Mulia. Kita buka selama tujuh hari untuk pembukaan pendaftaran baru bagi parpol, gabungan parpol, dan juga calon perseorangan.

Nah, sampai saat ini, Yang Mulia, kita sudah menerima ... saya bacakan saja. Pertama di provinsi, kita menerima satu dari Partai Aceh yang mendaftar, dua dari calon perseorangan. Kemudian di Banda Aceh ada satu dari Partai Aceh dan PAN (gabungan), kemudian satu dari perseorangan, Aceh Besar satu dari Partai Aceh, Sabang satu gabungan Partai Aceh dan PKS. Aceh Jaya dari Partai Aceh dan satu perseorangan. Aceh Barat dari Partai Aceh satu orang ... satu pasangan, Nagan Raya dari Partai Aceh satu pasangan, Simelu dari Partai Aceh dan Partai Pemuda Indonesia satu pasangan. Kemudian Aceh Barat Daya dari Partai Aceh, kemudian Pidie dari Partai Aceh, Bener Meriah dari Partai Aceh, Aceh Timur dari Partai Aceh dan satu pasangan dari perseorangan. Kemudian Aceh Utara dari Partai Aceh, Lhokseumawe satu pasangan dari Partai Aceh dan satu dari perseorangan. Kemudian Langsa dari... satu dari Partai Aceh, kemudian Aceh Singkil dua dari perseorangan. Jadi, itu yang sudah kami lakukan.

Dan yang kami lakukan di provinsi saat ini, kami sudah melakukan sesuai dengan Putusan Sela MK. Yang kami tafsirkan adalah kami sudah melakukan tes kesehatan selain membuka pendaftaran kepada para calon. Karena tes kesehatan ini juga harus terpusat di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin di Banda Aceh, karena rumah sakit itu yang kemudian paling mumpuni untuk bisa melakukan tes kesehatan di Aceh. Kemudian juga kami sudah melakukan tes uji baca Al Quran di provinsi dan diikuti oleh tiga pasangan ini. Nah, sampai tanggal 24 kemarin karena sudah ada calon perseorangan yang mendaftar.

Oleh karenanya menurut undang-undang diperlukan waktu untuk melakukan verifikasi terhadap dukungan KTP yang... yang sudah disampaikan kepada kami, sehingga kami sudah bersurat juga kepada Mahkamah Konstitusi dan juga kami akan... nanti mungkin melalui pengacara kami ambil kesimpulan, bahwa kami belum bisa menetapkan sesuai dengan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi, tapi prinsipnya kami sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh putusan sela Mahkamah Konstitusi tersebut dan saat ini kami masih melakukan verifikasi terhadap KTP yang diberikan oleh pasangan calon.

Demikian, Yang Mulia sedikit laporan dari kami terkait pelaksanaan putusan sela Mahkamah Konstitusi yang lalu.

Terima kasih, assalamualaikum wr.wb.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Walaikumsalam. Saudara... berapa Saudara perlukan waktu paling lama dan paling cepat.

12. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Ya.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Untuk melaksanakan pemungutan suara?

14. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Ya, kami sudah menghitung Yang Mulia, kami juga disela-sela putusan sela tersebut kami sudah berkoordinasi dengan KIP kabupaten/kota yang saat ini kami akan berbarengan atau kemudian pilkada serentak di 17 kabupaten/kota. Mereka membutuhkan waktu sekitar 56 hari dari hari H yang sudah kami tentukan kemarin.

Jadi kami me ... meminta ... oh ya ini masih draft Yang Mulia, belum kami putuskan karena kami masih berpendapat, masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Kami berharap bisa dilakukan hari H pada tanggal 9 April, tapi sekali lagi itu kami serahkan kepada putusan Majelis.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, menurut perhitungan normal, sementara yang sedang didiskusikan itu sebenarnya waktu dua minggu itu cukup.

16. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Dua minggu untuk verifikasi memang cukup, Yang Mulia. verifikasi dukungan KTP tersebut. Itu minimal, Yang Mulia karena nanti di (...)

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Enggak. Sampai dengan ... sampai dengan pemungutan suara?

18. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Ya.

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya kan?

20. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Ya.

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Cukup kan?

22. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Dua minggu sampai ... masih ... dua minggu yang kami butuhkan ini adalah dua minggu untuk melakukan verifikasi.

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sampai dengan penetapan?

24. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Ya, sampai dengan penetapan, Yang Mulia.

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya itu kan memang waktu normal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

26. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Ya itu maks ... minimal kemudian bisa ... bisa ... maksimalnya 21 hari, Yang Mulia. Kami diberikan kese (...)

27. KETUA: MOH. MAHFUD MD

21 hari?

28. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

He eh, ya.

29. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

21 hari itu maksudnya hari tambahan setelah penetapan yang pertama itu tanggal berapa? Februari itu?

30. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

16 Februari, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Nah, kalau ditambah dua minggu dari 16? Mengakomodir semua enggak sampai dengan pemungutan suara?

32. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Be ... be ... agak sedikit ini, Yang Mulia. Karena pertama adalah jika kemudian ada calon yang ditetapkan, itu akan berimbas kepada surat suara, kami sudah berkoordinasi dengan tim logistik dari KPU bahwa spek yang kita sudah buat agak berbeda kalau ada tambahan dari calon, Yang Mulia. Speknnya yang pertama adalah kita sudah menentukan empat calon, nah kalau ada lima calon, dia ada tambahan besarnya surat suara tersebut.

Sehingga diperlukan waktu lagi apakah kemudian di-restart dari awal pengadaannya atau bagaimana?

Nah, ini kita sedang berkoordinasi dengan logistik KPU, Yang Mulia atau kemudian bisa Perpes diamandemen atau bagaimana gitu, Yang Mulia.

33. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, begini. Itu kan waktu normal?

34. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Ya.

35. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Artinya waktu normal Anda membutuhkan 56 hari?

36. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Ya.

37. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Dalam proses yang sesuai tahapan?

38. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Ya.

39. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Kan begitu?

40. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Ya.

41. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Masing-masing tahapan itu ada waktu-waktu?

42. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Betul.

43. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Yang paling berat itu verifikasi dan pengadaan logistik pemilu kan?

44. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Betul.

45. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Karena itu harus berhadapan dengan penetapan pasangan calon dulu?

46. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Betul.

47. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Nah, tapi pengadaan pencetakan itu kan relatif, kalau dalam ketentuan, pengadaan logistik pemilu misalnya pencetakan surat suara itu, apakah dia itu tahapan tersendiri atau dia bersamaan dengan tahapan lain?

48. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Dia bisa bersa ... dia kan kalau di ... dia tahapan sendiri bilang, Yang Mulia. Karena gini, dia setelah ditetapkan baru bisa bekerja.

49. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Ya.

50. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

He eh. Kemudian juga dia berimplikasi kepada daftar pemilih tetap, Yang Mulia. Daftar pemilih tetap ini berkonsekuensi pada jumlah logistik yang akan dicetak.

51. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, juga ya.

52. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Karena kan, kalau misalnya ini diundur, Yang Mulia. Kita harus melihat misalnya saja kalau jadi tanggal 9 April harus ada misalnya pemilih yang ada 17 tahun pada tanggal 9 April dia punya ke ... hak untuk memilih. Nah ini kan (...)

53. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Artinya ada perbaikan DPT?

54. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Oh ya, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Dalam tahapan ini masih dimungkinkan ada perbaikan DPT?

56. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Masih dalam perhitungan kami. Karena umur, itu betul Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Tapi untuk pencetakan surat suara itu ... berarti setelah DPT dong?

58. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Betul, Yang Mulia. Makanya kami membuat (...)

59. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Dan itu sudah tahapan terakhir kan? Setelah itu kan didistribusi?

60. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Betul, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Dan untuk pencetakan surat suara berdasarkan ketentuan, berapa minggu, berapa hari pelaksanaannya?

62. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Kalau kita lihat di sini, Yang Mulia. ini sekitar 3 minggu ... 2-3 minggu, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Nah itu, masih bisa ada space-nya lah.

64. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA

Ya. Kemudian mungkin sedikit, Yang Mulia. Bahwa kalau kemudian pada saat ini Pemilukada Kabupaten Pidie walaupun sudah diajukan penundaan oleh KIP kepada DPR Hak, kepada gubernur, dan juga kepada Depdagri. Tapi sampai saat ini belum ada keputusan.

Sehingga kalau kemudian ini bisa bersamaan KIP Pidie ini belum melakukan proses pengadaan logistik Yang Mulia. Sehingga ini juga akan memakan waktu jika ingin disamakan KIP ini dengan 17... 16 kabupaten kota lain dan 1 di provinsi. Ini juga kami sudah (...)

65. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Tenggang waktu 6 bulan sudah masuk?

66. WAKIL KETUA KPU: ILHAM SAPUTRA

Tenggang waktu 6 bulan saya kira sampai saat ini (...)

67. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Untuk Pidie.

68. WAKIL KETUA KPU: ILHAM SAPUTRA

Untuk Pidie belum (...)

69. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Kan tadinya kan di luar yang 17 kan?

70. WAKIL KETUA KPU: ILHAM SAPUTRA

Oh, enggak. Sama, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Sama. Kenapa ditunda?

72. WAKIL KETUA KPU: ILHAM SAPUTRA

Karena itu, Yang Mulia. Karena bupatinya tidak bersedia mengeluarkan anggaran karena dianggap masih ada konflik regulasi.

73. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Kalau itulah persoalan lainlah.

74. WAKIL KETUA KPU: ILHAM SAPUTRA

Ya, Yang Mulia. Terima kasih.

75. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik. Cukup ya, untuk keterangan dari Pemohon. Pihak Terkait ingin menyampaikan sesuatu?

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR

Terima kasih, Majelis. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kemarin Majelis telah mengeluarkan putusan sela.

Jadi kami dari Pihak Terkait sebagai peserta calon untuk gubernur dan tentunya kami juga sebenarnya mewakili juga untuk para calon yang lain. Jadi kami ingin supaya... apa namanya, putusan sela ini betul-betul putusan sela yang telah dikeluarkan, dilaksanakan secara penuh, secara total, secara menyeluruh.

Dan kami melihat Pihak Termohon dalam pelaksanaan putusan sela itu tidak menyeluruh. Contohnya di sini jelas dikatakan bahwa putusan ... dalam putusan sela membuka kembali pendaftaran kembali pasangan calon gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota-wakil walikota untuk memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik maupun perseorangan, termasuk pelaksanaan verifikasi dan penetapan bagi pasangan calon baru sampai dengan 7 hari sejak putusan ini diucapkan.

Jadi yang baru dilaksanakan oleh KIP sebagaimana keterangan KIP barusan adalah baru membuka kembali pasa ... pendaftaran, kalau verifikasi belum dilaksanakan sepenuhnya. Konon lagi masalah penetapan, penerapan calon sampai saat ini belum dilaksanakan.

Yang menjadi pertanyaan kami adalah ketika putusan sela ini tidak mampu dilaksanakan sepenuhnya oleh KIP, bagaimana landasan yuridis, landasan hukum tentang pelaksanaan pemilukada di Aceh di kemudian hari? Ini menimbulkan potensi konflik regulasi terbaru di kemudian hari, itu.

Terus dalam pelaksanaannya juga, untuk lef... untuk tingkat provinsi, itu memang ada selain calon dari Partai Aceh yang mendaftar, juga ada calon dari perseorangan yang mendaftar.

Dan yang sangat mengecewakan kami adalah batas waktu yang jelas-jelas ditentukan 7 hari itu sampai tanggal 24 Januari sampai jam 24.00 malam, itu ada 2 orang yang mendaftar... 2 pasangan yang mendaftar. Yang pertama yang mendaftar itu jam 10.00 ... jam 11.30 dan jam 12.00. Mereka hanya membawa dukungan KTP. Seharusnya ketika seseorang ingin mendaftar itu harus membawa rekapan, baik soft copy atau hard copy. Ini Cuma membawa tentengan dukungan KTP. Terus (...)

77. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, ya. Itu kan belum diputus, kan? Itu belum diputuskan soal siapa yang sah siapa yang tidak, belum kan?

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR

Belum.

79. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Jadi semua itu yang diurus (...)

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR

Saya ingin menambahkan, terus dari KIP sendiri itu menyuruh untuk kembali di kemudian hari. Padahal kan batas pendaftaran sudah selesai, Majelis.

81. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Itu nanti, itu bukan bagian dari SKLN. Itu nanti diproses, kalau ada masalah kan bisa di ... pelaksanaannya yang dipersoalkan, bukan SKLN-nya.

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR

Betul.

83. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Oke, cukup ya. Baik (...)

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABUBAKAR

Saya tambahan, Majelis. Kami hanya ingin... apa namanya, pemilukada itu berdasarkan apa yang telah Majelis ini putuskan. Terima kasih, Majelis.

85. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik. Baik, Saudara sekalian. Semua sudah didengarkan. Untuk ini sidang akan diskors dan nanti akan dibuka kembali pada pukul 11.00. Jadi diskors selama 2 jam karena ini mau ada sidang lain sekarang, dan sidang dinyatakan diskors sampai jam 11.00.

KETUK PALU 3X

SIDANG DISKORS PUKUL 08.48 WIB

Jakarta, 27 Januari 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.